

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangannya peradaban manusia tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Perubahan yang dialami manusia merupakan suatu kebutuhan yang mendasarkan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur yakni menjadikan manusia untuk lebih baik dan beradab. Dengan dianugerahi akal dan pikiran, manusia hidup berdampingan dengan teknologi sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu manusia dituntut untuk lebih dan mampu melakukan pengembangan-pengembangan seperti bidang ilmu pengetahuan, penelitian, bisnis dan riset teknologi. Hal tersebut membuat manusia semakin bergantung terhadap perkembangan teknologi.

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang memiliki ideologi pancasila. Sebagai Negara yang besar, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur Negara serta mensejahterakan rakyat Indonesia dengan pemerataan ekonomi serta pembangunan yang merata. Menurut Kurniawati (2017); Fatima & Adi (2019); Herlan & Chasbiandani (2019); Mahadianto & Rahmawati (2019); dan Iskandar (2020), salah satu pendapatan negara yang menjanjikan untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dan memenuhi anggaran pemerintah adalah dari sektor pajak (Sulistiyowatie & Amelia, 2020). Untuk mengelola keuangan Negara, pemerintah memiliki regulasi sebagai dasar dan pedoman dalam mencatat keuangan Negara. Pemerintah Indonesia dalam mengelola keuangan Negara menggunakan standar akuntansi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peningkatan dunia usaha dan bisnis ditengah masyarakat, membuat kita semakin kompetitif dalam mengatur kondisi keuangan. Begitu juga dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus lebih proaktif guna mempersiapkan bagaimana tantangan kedepan baik dari segi pembangunan maupun kepentingan atas hajat orang banyak serta mewujudkan cita cita luhur bangsa. Berbagai macam kebijakan strategis yang diluncurkan sebagai alternatif pengelolaan keuangan negara agar tepat sasaran, akuntabilitas dan efisien. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang semula tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korupsi menuju suatu tatanan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, penggunaan dan pengelolaan keuangan negara pemerintah harus taat terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Begitu juga pemerintah daerah yang pengelolaannya juga dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Tujuan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah ialah untuk mendukung terwujudnya *good governance* yang penyelenggaraannya secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan yang biasa disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan diperlukan menerapkan azas-azas yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai informasi posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pemerintah daerah akan menyusun laporan keuangan atas semua transaksi yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang dianggap bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi juga untuk mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya ekonominya.

Kualitas laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban entitas bisnis atau organisasi tertentu terhadap sumber daya ekonominya. Tujuan utama dari kualitas laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang sehat dan bersih dari kesalahan-kesalahan pencatatan transaksi. Kualitas laporan keuangan dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan suatu entitas untuk menentukan arah dan perencanaan selanjutnya.

Kualitas laporan keuangan dihasilkan dari laporan keuangan yang baik dan memenuhi standar akuntansi. Laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dapat dipahami, dapat memenuhi kebutuhan, terbebas dari definisi menyesatkan dan tidak terdapat kesalahan dalam penyajiannya sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat penting bagi suatu entitas. Kualitas laporan keuangan akan menentukan nasib entitas dalam kelangsungan aktivitas bisnis, oleh karena itu entitas mempunyai tanggungjawab atas posisi keuangan yang disusun dalam bentuk laporan keuangan secara maksimal.

Laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh auditor independen sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban entitas apakah sesuai dengan ketentuan akuntansi atau terdapat kesalahan dalam penyusunan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh auditor dan mendapatkan penilaian disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Suharyono, S (2020) opini yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang disusun merupakan salah satu cerminan bahwa laporan keuangan tersebut memiliki kualitas. Penilaian audit yang diberikan atas LKPD ada lima opini yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat atau *disclaimer*.

Tabel 1.1 Penilaian BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terhadap LKPD Bengkalis.

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Bengkalis	Tahun Anggaran	Penilaian BPK RI
1	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2011	Tidak Wajar
2	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2012	Wajar Dengan Pengecualian
3	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
4	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
5	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2021	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BPK RI Data Olahan 2022

Dalam upaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau seperti tabel yang tertera diatas. Berdasarkan liputan yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021, Jumat 20 Mei 2022, diruang rapat lantai II Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

Dengan diterimanya penghargaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis meraih 9 kali berturut-turut opini WTP dari BPK Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya kemampuan dan kualitas pegawai yang memberikan kontribusi untuk mengabdikan diri terhadap instansi Pemerintah. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperoleh WTP dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu mendapatkan penghargaan Opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau tersebut. Selanjutnya didalam liputan Bengkalis.go.id, Bupati mengatakan “Namun demikian, kami tetap memiliki komitmen serta lebih serius melaksanakan setiap kebijakan Pemerintah dengan menindaklanjuti serta mengacu pada semua petunjuk, arahan serta regulasi yang dibuat pemerintah dengan melakukan serta membangun sinergi, koordinasi, dan konsultasi bersama Pemerintah Pusat maupun Provinsi”.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari kerja sama antar organisasi perangkat daerah, sehingga perangkat daerah yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja secara optimal dan konsisten. Tujuan dari organisasi tidak dapat dikatakan berhasil jika tidak ditunjang dengan kemampuan pegawainya, sebab antara organisasi dan pegawai memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Keadaan seperti ini merupakan konsep dari komitmen organisasi. Seperti yang dikatakan Ola, dkk (2019) pegawai dengan komitmen yang baik akan menentukan seberapa besar pencapaian kinerjanya dalam organisasi tersebut karena tumbuh rasa kecintaan pada pekerjaannya (Azyiah & Yanto, 2022).

Untuk menciptakan kualitas laporan keuangan sesuai dengan penjelasan diatas diyakini ada beberapa faktor, antaranya adalah kompetensi sumber daya manusia. Setiap pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerjanya serta menunjang tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Kinerja seorang pegawai dapat diukur berdasarkan indikator kinerja, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pegawai. Dengan mengetahui peningkatan kinerja pegawai maka organisasi dapat

menentukan tujuan organisasi. Sebuah organisasi yang baik dan ingin tujuan dari organisasi tersebut tercapai tentu harus memiliki hubungan kerja yang baik pula, termasuk hubungan antara pegawai dan atasan. Intansi atau organisasi harus mampu memberikan haknya kepada pegawai agar pegawai merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Sehingga pegawai akan merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban terhadap tugas yang diberikan.

Setiap organisasi akan selalu berusaha meningkatkan kinerja pegawainya demi tercapai tujuan organisasi yang sudah dirancang. Pengabdian dan kontribusi pegawai menjadi sangat penting jika dilakukan dengan efektif dan benar. Kinerja pegawai akan menjadi lebih tinggi dan profesional serta mengandung arti peningkatan efesiensi, efektifitas, dan kualitas yang maksimal dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada pegawai tenaga akuntansi dalam suatu organisasi adalah termasuk hasil dari pencapaian kinerja atas tugas tertentu.

Sebagai pemenuhan kebutuhan baik didunia usaha dan bisnis terkhususnya dalam rangka urusan pemerintah tentunya sangat memberikan manfaat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Jogiyanto (1995) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Rahmawati, Mustika dan Eka 2018).

Selain daripada itu untuk menunjang laporan keuangan agar menjadi lebih berkualitas dan meminimalisir dari kesalahan materil, maka setiap pegawai juga harus memiliki motivasi kerja. Motivasi seringkali diartikan sebagai dorongan terhadap individu yang menghasilkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, sehingga seseorang akan melakukan tindakan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Sedangkan motivasi dalam konteks pekerjaan merupakan dorongan

yang dimiliki seseorang atau karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggungjawab, sehingga karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan juga pegawai atau karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Motivasi kerja dipercayai bahwa akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, pernyataan ini juga diungkapkan oleh Holle, Sale dan Sanggenafa (2019) membahas tentang beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti motivasi kerja yaitu salah satu faktor penentu lainnya yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah motivasi kerja. Untuk menghasilkan kinerja yang baik seperti laporan keuangan yang berkualitas maka akan dibutuhkan motivasi kerja yang tinggi pula agar tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai, khususnya ruang lingkup pemerintah dimana harus berupaya meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggara pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Beberapa penelitian yang membahas tentang laporan keuangan dan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti Hasanah dan Siregar (2021) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya adalah Animah, Suryantara dan Astuti (2020) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian yang berbeda terkait kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan kesimpulannya adalah Leiwakabessy (2021) mengatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain yang mendukung hasil riset ini juga mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar 27,1% oleh (Lisda, Nurwulan dan Septiana 2018).

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap laporan keuangan adalah Azyiah, dan Yanto (2022) mengatakan komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun menurut Tampubolon dan Basid (2019) variabel komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah DKI Jakarta.

Penelitian lain yang membahas juga tentang kualitas laporan keuangan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah Chodijah dan Hidayah (2018) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian selanjutnya adalah Rahmawati, Mustika dan Eka (2018) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang berbeda dan bertolak belakang adalah Tampubolon dan Basid (2019) berdasarkan kesimpulan risetnya, variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian selanjutnya yang mengungkapkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah Holle, Sale dan Sanggenafa (2019), Sasneti (2022), dan Rahmawati dan Trisnawati (2021). Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang sama yaitu motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun disamping itu penelitian yang berbeda menyatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, antaranya adalah Yusriwati dan Susanti (2022) dan Kartopawiro dan Susanto (2018).

Beberapa penelitian telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti variabel yang dipaparkan oleh peneliti, serta masih terdapat perbedaan hasil yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Seiring dengan berjalannya waktu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendapatkan WTP sebanyak 9 kali berurutan-turut. Dengan

demikian penulis ingin melakukan riset atau menguji beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis?
4. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bengkalis?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembahasan pada penelitian ini lebih memfokuskan mengenai kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan motivasi kerja serta kualitas laporan keuangan. Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh staff tenaga akuntansi, sub bidang keuangan dan bendahara di setiap SKPD, karna merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan disetiap SKPD di Kabupaten Bengkalis.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang melatarbelakangi dalam riset ini, maka tujuan penelitian memiliki harapan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan dibahas, maka diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam menulis karya ilmiah terkhusus melakukan analisis dan menguji kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi terhadap laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
2. Dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintahan Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi.
3. Menjadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam meneliti dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar gambaran penelitian ini menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, maka berikut disajikan sistematika penulisan penelitian:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil sebagai bahan referensi terhadap topic yang akan dibahas. Selanjutnya terdapat beberapa landasan teori yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab metode penelitian akan menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, obyek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep serta operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Pada penelitian ini akan membahas deskripsi data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penjelasan analisis data yang telah dilakukan serta menyajikan hasil penelitian.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab terakhir penulis akan mengambil kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan kemudian peneliti akan mencoba untuk memberikan saran perbaikan apabila diperlukan.